



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Dr. Sutomo No. 14 Batang 51215 Jawa Tengah Telp (0285) 39070767

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BATANG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 900/ *06* /2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN BARANG, DAN  
PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)  
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat ini, dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam membantu kelancaran pengelolaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

- :** Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

- :** Pejabat sebagaimana disebutkan pada diktum "KESATU" keputusan ini mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

**A. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

1. Mengendalikan dan melaksanakan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

**B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
3. Menetapkan rancangan kontrak;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan tim pendukung;
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. Melaksanakan epurchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
10. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
11. Mengendalikan kontrak;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan



15. Menilai kinerja penyedia;
16. Melaksanakan pelimpahan wewenang kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
  - i. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - ii. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

**C. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa**

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan;
4. Melaksanakan epurchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

**D. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)**

1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

**KETIGA**

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupate Batang selaku Pengguna Anggaran, sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

**KEEMPAT**


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang tahun Anggaran 2021.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN BATANG  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

  
**SUPRAPTO, S. Sos. M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660925 199710 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang  
 Nomor : 900/06 /2021, Tanggal 4 Januari 2021  
 Tentang : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
 Kabupaten Batang

**DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK),  
 PEJABAT PENBUAT KOMITMEN (PPKOM), PEJABAT PENGADAAN, DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)  
 PADA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK	PPK	PEJABAT PENGADAAN	PPHP
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>2.972.275.900</b>				
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>2.000.000</b>	IKA DIANAWATI, SE, MM.	SUPRPTO, S.Sos, M.Si	KHOIRUL MUANAM., SE, MM	BUDI SETYONINGSIH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>2.595.344.400</b>	IKA DIANAWATI, SE, MM.	SUPRPTO, S.Sos, M.Si	KHOIRUL MUANAM., SE, MM	BUDI SETYONINGSIH
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.398.904.400				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	196.440.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>120.441.500</b>	NANIK NUR KHOLILAH., S.STP., MM	SUPRPTO, S.Sos, M.Si	KHOIRUL MUANAM., SE, MM	BUDI SETYONINGSIH
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.999.100				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.999.900				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.142.500				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.800.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>150.000.000</b>	NANIK NUR KHOLILAH., S.STP., MM	SUPRPTO, S.Sos, M.Si	KHOIRUL MUANAM., SE, MM	BUDI SETYONINGSIH



NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK	PPK	PEJABAT PENGADAAN	PPHP
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.440.000				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.560.000				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.490.000	NANIK NUR KHOLILAH., S.STP., MM	SUPRPTO, S.Sos, M.Si	KHOIRUL MUANAM., SE, MM	BUDI SETYONINGSIH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan . Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.560.000				
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000				
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	11.930.000				
B	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	953.839.000				
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	677.139.000	YUSTINUS GANDI WN., SE.	YUSTINUS GANDI WN., SE.	KHOIRUL MUANAM., SE, MM	ANTON KUSMAEDI, A.Md
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi ( APBD )	677.139.000				
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000	YUSTINUS GANDI WN., SE.	YUSTINUS GANDI WN., SE.	KHOIRUL MUANAM., SE, MM	ANTON KUSMAEDI, A.Md
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25.000.000				
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	251.700.000	YUSTINUS GANDI WN., SE.	YUSTINUS GANDI WN., SE.	KHOIRUL MUANAM., SE, MM	ANTON KUSMAEDI, A.Md
	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	251.700.000				
C	Program Penempatan Tenaga Kerja	176.700.000				

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK	PPK	PEJABAT PENGADAAN	PPHP
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	176.700.000	YUSTINUS GANDI WN., SE.	YUSTINUS GANDI WN., SE.	KHOIRUL MUANAM., SE, MM	ANTON KUSMAEDI, A.Md
Pelayanan Antar Kerja	176.700.000				
Program Hubungan Industrial	280.595.011				
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/ Kota	140.000.000	BUDI SETYANINGSIH, S.Si	SUPRPTO, S.Sos, M.Si	KHOIRUL MUANAM., SE, MM	MIFTAKHUR ROZAK, SE
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	50.000.000				
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	90.000.000				
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	140.595.011	BUDI SETYANINGSIH, S.Si	SUPRPTO, S.Sos, M.Si	KHOIRUL MUANAM., SE, MM	MIFTAKHUR ROZAK, SE
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	140.595.011				
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	42.000.000				
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 ( satu ) Daerah Kabupaten/ Kota	42.000.000	YUSTINUS GANDI WN., SE.	YUSTINUS GANDI WN., SE.	KHOIRUL MUANAM., SE, MM	ANTON KUSMAEDI, A.Md
Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	42.000.000				
TOTAL	4.425.409.911				

